Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 33768-33777

Politik Ingatan dan Penghapusan: Hilangnya Identitas Orang 'Indo' dari Narasi Keindonesiaan

Resti Budiarti[1], Fernanda Estepan[2], Pujiati[3]
[1]Universitas Sumatra Utara, [2]Universitas Sumatra Utara, [3]Universitas Sumatra Utara
Corresponding Author: Resti Budiarti, Fernanda Estepan, e-mail: resti.budiarti07@gmail.com, fernandaestevan@rocketmail.com, pujiati@usu.ac.id

Published: December, 2025

ABSTRACT
Artikel ini menganalisis proses hilangnya identitas orang Indo dari narasi nasional Indonesia melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci. Dengan menelaah hubungan antara kekuasaan, ingatan kolektif, dan representasi kultural, penelitian ini menyoroti bagaimana negara pascakolonial membentuk "keindonesiaan" melalui mekanisme seleksi sejarah dan politik kebudayaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis wacana kritis terhadap teks sejarah, arsip kolonial, dan representasi media, penelitian ini menemukan bahwa penghapusan orang Indo dari narasi nasional merupakan bagian dari proyek hegemonik negara untuk membangun identitas nasional yang homogen, anti-kolonial, dan berlandaskan dikotomi "pribumi versus penjajah." Hasilnya menunjukkan bahwa memori kolektif tentang komunitas Indo mengalami marginalisasi sistematis melalui institusi, historiografi, dan budaya populer.

Keywords: Politik Ingatan, Hegemoni Gramsci, Orang Indo, Identitas Nasional, Pascakolonialisme

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Identitas orang Indo (Eurasian), hasil percampuran rasial dan kultural antara Eropa dan penduduk lokal Nusantara, memiliki peran yang kompleks dalam struktur sosial kolonial Hindia Belanda. Dalam konteks kolonial, kelompok ini menempati posisi ambivalen: di satu sisi memperoleh privilese sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih tinggi dibandingkan bumiputra, namun di sisi lain tidak pernah sepenuhnya diterima sebagai "Eropa murni." Posisi yang "di antara" ini menciptakan dinamika sosial yang khas, di mana orang Indo menjadi penghubung sekaligus pemisah antara dunia kolonial dan pribumi(R. L. Hewwet, 2016). Sebagaimana dicatat (R. Hewwet, 2017), struktur sosial kolonial membangun kategori rasial yang hierarkis dengan Indo di tengah-tengah, menjadikan mereka agen penting bagi kelangsungan sistem kolonial, namun sekaligus subjek yang rentan secara politis.

Keterikatan historis ini menimbulkan problem serius setelah Indonesia merdeka. Identitas Indo, yang begitu sentral dalam kehidupan sosial Hindia Belanda, nyaris lenyap dari kesadaran nasional pasca-1950-an. Dalam narasi nasionalisme yang menekankan keaslian dan kepribumian, Indo menjadi entitas yang tidak sesuai dengan ideologi baru bangsa yang ingin membebaskan diri dari segala jejak kolonial. Hilangnya eksistensi dan narasi kolektif mereka dari historiografi Indonesia menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana kelompok yang memiliki signifikansi sosial-politik dalam masa kolonial bisa terhapus sepenuhnya dari imajinasi nasional pascakolonial?

Fenomena ini mengandung dimensi politik ingatan (memory politics) yang kuat. Jan Assmann berargumen bahwa ingatan kolektif tidak pernah netral, melainkan hasil konstruksi sosial yang menentukan identitas dan legitimasi sebuah bangsa (Assmann & Czaplicka, 1995a). Dalam konteks Indonesia, proyek nasionalisme pascakolonial menyeleksi aspek sejarah tertentu untuk diingat dan menghapus lainnya agar sesuai dengan ideologi nasional. Dalam proses inilah identitas Indo

mengalami marginalisasi simbolik dan politis. Seperti ditunjukkan Olick dan Robbins (1998), penghapusan memori terhadap kelompok tertentu berfungsi untuk menegakkan "memori hegemonik" yang menjadi dasar identitas bersama suatu bangsa (Olick & Robbins, 1998).

Jika dalam pengalaman etnis Tionghoa peminggiran dilakukan melalui kebijakan diskriminatif dan represi negara, seperti Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang membatasi praktik budaya mereka (Aryani, 2022), pada kasus orang Indo mekanismenya lebih subtil: mereka "dihapus" secara naratif melalui apa yang dapat disebut kelupaan struktural (structural amnesia). Negara pascakolonial tidak melakukan penindasan langsung, melainkan membiarkan emigrasi massal dan penyingkiran simbolik terjadi secara alami sebagai bentuk hegemoni pasif. Menurut Gramsci, inilah bentuk kekuasaan hegemonik paling efektif, bukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi dengan membangun konsensus moral dan ideologis yang membuat dominasi tampak wajar (Gramsci, 2021, p. 142).

Hilangnya jejak Indo dari sejarah resmi menunjukkan bahwa pembentukan identitas nasional Indonesia tidak sekadar merupakan proses politik, tetapi juga kultural dan epistemik. Dalam teori hegemoni Antonio Gramsci, penguasaan ide dan makna merupakan bentuk kekuasaan tertinggi karena menentukan apa yang dianggap "normal" dalam kesadaran kolektif. Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan kelas dominan bertahan bukan hanya melalui aparatus koersif (negara, hukum, militer), tetapi melalui superstruktur ideologis seperti pendidikan, media, dan budaya yang menanamkan ideologi hegemonik dalam kehidupan sehari-hari (Gramsci, 2021, p. 124).

Dalam konteks Indonesia, ideologi nasionalisme yang menekankan kemurnian dan kepribumian menjadi instrumen hegemonik yang menyingkirkan identitas hibrid seperti Indo. Hegemoni nasionalisme ini beroperasi dengan membangun consent sosial—yakni kesediaan masyarakat untuk menerima bahwa hanya identitas "asli" yang layak menjadi bagian dari bangsa. Dengan cara ini, penghapusan Indo terjadi bukan karena paksaan eksplisit, tetapi karena diterimanya ideologi nasionalisme puritan sebagai kebenaran moral. Seperti ditegaskan Anderson, nasionalisme Indonesia dibangun atas imajinasi komunitas yang homogen; segala bentuk ambiguitas atau ketidaksesuaian dengan kategori "asli" dianggap ancaman terhadap keutuhan bangsa (Anderson, 1991).

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, dari perspektif historiografi dan politik ingatan, penghapusan ini mencerminkan bagaimana negara pascakolonial memilih untuk melupakan bagian sejarah tertentu yang tidak sejalan dengan citra nasional ideal. Kedua, dari perspektif teori hegemoni, kasus Indo menjadi contoh bagaimana kekuasaan ideologis dapat menghapus kelompok sosial secara simbolik tanpa kekerasan langsung. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami bagaimana hegemoni kultural bekerja dalam produksi memori nasional Indonesia dan bagaimana bentuk penghapusan naratif ini berlangsung.

Hilangnya orang Indo dari wacana nasionalisme Indonesia tidak bisa dipahami semata sebagai akibat migrasi atau asimilasi, melainkan sebagai hasil dari proyek ideologis yang lebih besar. Setelah Konferensi Meja Bundar (1949), Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian opsi kewarganegaraan yang memungkinkan warga Indo memilih antara kewarganegaraan Belanda atau Indonesia. Dalam praktiknya, tekanan sosial dan ketidakpastian hukum membuat banyak Indo memilih untuk meninggalkan Indonesia. Migrasi massal ini sering dijelaskan sebagai fenomena ekonomi atau politik, tetapi jika dibaca melalui kerangka hegemoni, dapat dipahami sebagai bentuk paksaan ideologis tidak langsung, di mana sistem nilai nasional membuat mereka merasa tidak lagi memiliki tempat di tanah kelahiran sendiri (Bosma et al., 2013).

Setelah kepergian mereka, jejak Indo dihapus dari berbagai aspek kehidupan publik. Dalam historiografi nasional, nama-nama seperti Ernest Douwes Dekker (Setiabudi) jarang disebut sebagai figur Indo, melainkan hanya sebagai pejuang nasional. Dalam kurikulum sekolah, periode kolonial direpresentasikan secara dikotomis: pribumi yang tertindas melawan penjajah Eropa, tanpa ruang bagi

kategori perantara seperti Indo (Reid. Anthony, 2010). Ini menunjukkan bahwa politik ingatan nasional bekerja dengan logika eksklusi—segala yang tidak sesuai dengan narasi resistensi total terhadap kolonialisme dihapus demi konsistensi ideologis.

Dalam hal ini, hegemoni nasionalisme Indonesia beroperasi melalui apa yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik, aktor-aktor yang berperan dalam memproduksi dan menyebarkan ideologi dominan (Gramsci, 2021). Intelektual organik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, seperti Sutan Takdir Alisjahbana atau Ki Hadjar Dewantara, menekankan pentingnya "jiwa nasional" dan "kepribadian Indonesia asli." Narasi ini, meskipun progresif dalam konteks antikolonial, turut mengukuhkan logika eksklusif terhadap identitas hibrid. Dengan demikian, penghapusan Indo dapat dipahami sebagai hasil dari kemenangan hegemoni ideologis yang menolak keragaman demi stabilitas moral bangsa.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada mekanisme sosial-kultural yang berkontribusi pada "hilangnya" identitas Indo dari wacana keindonesiaan antara akhir kolonialisme hingga era pascakolonial awal (sekitar 1945–1970-an), dengan perluasan reflektif ke periode berikutnya sebagai latar retrospektif. Kajian ini mengadopsi kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis pertanyaan penelitian (1) bagaimana institusi negara dan intelektual organik memproduksi konsensus kebangsaan; (2) bagaimana politik ingatan (politics of memory) berfungsi untuk menyeleksi representasi sejarah; dan (3) bagaimana wacana publik, kurikulum, dan budaya populer meneguhkan atau mereduksi kehadiran Indo dalam narasi identitas nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough, 1995) yang berpijak pada teori hegemoni Gramsci. Sumber data terdiri dari:

1. Kajian terdahulu.
2. Narasi historiografi nasional, misalnya buku pelajaran sejarah Indonesia 1950–1990-an.
3. Representasi budaya populer, termasuk film seperti Indisch Heritage dan Soerabaia 45, serta pemberitaan media masa awal kemerdekaan.

Analisis difokuskan pada bagaimana wacana-wacana tersebut membangun dan menormalisasi citra tentang "keindonesiaan" yang menyingkirkan identitas Indo, serta bagaimana kelas intelektual dan politik nasionalis berperan sebagai organik intelektual dalam membentuk kesadaran nasional hegemonik (Gramsci, 1971:10–14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsensus Kebangsaan

Menurut Antonio Gramsci, kekuasaan negara dalam masyarakat kapitalis modern (yang disebut Negara Integral) terdiri dari dua wilayah yang saling melengkapi: Masyarakat Politik (*Political Society*), tempat kekuasaan koersif (paksaan) dijalankan melalui aparat negara, dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*), tempat kepemimpinan intelektual dan moral dijalankan melalui Intelektual Organik untuk memenangkan persetujuan (*consensus*) dari massa (Gramsci, 2021). Fase awal kemerdekaan Indonesia merupakan periode krusial di mana *Political Society* menggunakan instrumen hukum untuk mendefinisikan dan mengelompokkan warga negara, sebuah langkah yang secara tidak langsung mengatur eliminasi identitas minoritas. Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah "orang yang asli dalam negara Indonesia" (Pribumi), dan juga mencakup orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu (Aziz, 2011, p. 15). Penetapan kategori 'asli' versus 'peranakan' ini secara fundamental meletakkan dasar bagi diskriminasi naratif dan struktural di masa depan. Koersi struktural mencapai puncaknya melalui Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949. Perjanjian ini, yang disepakati dalam konteks hubungan diplomatik yang tegang pasca-revolusi, memberikan masa opsi kewarganegaraan bagi "orang-orang

keturunan" (termasuk Indo) untuk memilih antara menjadi warga negara Indonesia atau mempertahankan kewarganegaraan Belanda. Batas waktu opsi ini berlangsung hingga 27 Desember 1951. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat koersif struktural yang memaksa individu Indo, yang secara historis memiliki identitas ambigu, untuk membuat pilihan biner yang menentukan nasib politik dan demografis mereka.

Gramsci mengingatkan kita bahwa kekuasaan efektif seringkali bekerja melalui budaya dan konsensus — bukan hanya koersi. Dalam kasus Indo, dokumen mengusulkan bahwa nasionalisme pascakolonial membangun konsensus tentang siapa yang dianggap "inti" bangsa (pribumi) sehingga identitas hibrid mudah dibaca sebagai inkonsisten atau tidak sah. Konseptualisasi ini digabungkan dengan literatur memori kolektif (Assmann) untuk menunjukkan bagaimana negara mengelola "materi ingatan" melalui kurikulum, arsip, dan ritual kenegaraan sehingga kelupaan dapat menjadi politik praktis — bukan kebetulan. ((Gramsci, 2021); (Assmann & Czaplicka, 1995b)). Mereka yang memilih bertahan, yang dikenal sebagai *Blijvers* (dalam konteks pewarganegaraan keturunan Belanda yang menetap), secara otomatis kehilangan bobot politik kolektif dan harus berasimilasi secara cepat ke dalam norma-norma nasional yang sedang terbentuk. Keberadaan kelompok ini, yang terus dikategorikan sebagai 'keturunan' atau 'peranakan', terus diperlakukan berbeda dari 'orang asli'. Dengan demikian, penghapusan naratif menjadi mungkin dan mudah karena *Political Society* telah berhasil mengurangi basis demografis kelompok Indo, menghilangkan kebutuhan akan dominasi koersif yang keras di masa selanjutnya. UU 1946 dan Opsi KMB berfungsi sebagai alat koersif struktural: bukan pemaksaan fisik untuk berasimilasi, melainkan *pemaksaan struktural untuk memilih*, yang menghasilkan eliminasi fisik melalui eksodus.

Jika *Political Society* menghilangkan basis fisik Orang Indo, maka Masyarakat Sipil mengambil peran untuk menghilangkan memori mereka. *Civil Society* adalah arena di mana kepemimpinan intelektual dan moral diwujudkan melalui lembaga-lembaga seperti media massa, pendidikan, dan lembaga kebudayaan, yang berperan penting dalam membentuk kesadaran massa dan mengatur konsensus. Di sinilah peran Intelektual Organik—mereka yang secara sadar atau tidak sadar membantu kelas dominan menyebarkan ideologi—menjadi sentral. Selama Orde Baru (1967–1998), politik ingatan didominasi oleh militer dan negara , yang secara ketat mengontrol sistem komunikasi massa untuk mengeluarkan "kisah-kisah yang disetujui pemerintah" yang memengaruhi pemikiran masyarakat. Upaya memaksakan satu tafsir tunggal terhadap masa lalu ini adalah tindakan totaliter yang mengebiri pluralitas pengalaman dan ingatan kolektif , dan inilah pekerjaan Intelektual Organik negara. Intelektual Organik (sejarawan, penulis kurikulum, pendidik) berfungsi sebagai perantara antara kelas yang berkuasa dengan massa. Mereka memastikan bahwa narasi yang bertentangan dengan kepentingan hegemoni nasionalis—termasuk narasi Indo yang kompleks—dihilangkan melalui omisi naratif yang disengaja.

Kurikulum pendidikan, sebagai salah satu alat paling kuat dari *Civil Society*, difokuskan pada penguatan rasa cinta tanah air (Kurikulum 1968) dan penelusuran asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang bersifat praaksara, alih-alih narasi yang rumit dari masa kolonial akhir. Dengan menekankan narasi *ethnocultural* yang menghubungkan kebangsaan dengan kesamaan nenek moyang dan sejarah yang "adiluhung", Intelektual Organik secara efektif: 1) Membatasi Kategorisasi Keindonesiaan: Mereka memaksakan identitas Keindonesiaan yang bersifat *given* (sudah jadi), di mana kelompok yang terikat pada warisan rasial kolonial—seperti Indo—secara ideologis tidak memiliki tempat. 2) Menyebar Konsensus Kelupaan: Penghapusan narasi Indo dari buku teks dan wacana publik merupakan bukti bahwa *Civil Society* berhasil menjalankan fungsi hegemoni melalui omisi. Dengan tidak adanya representasi dalam memori kolektif yang dibentuk negara, identitas Indo menjadi tidak relevan dan mudah dilupakan.

Tujuan akhir dari hegemoni adalah memenangkan konsensus dan menciptakan *sensi comune* (akal sehat), yaitu ideologi dominan yang diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran yang tidak dipertanyakan atau hal yang 'wajar' (*given*). Dalam kasus Indo, *sensi comune* yang diproduksi oleh Intelektual Organik nasionalis adalah: 1) Akal sehat nasionalis memandang Indo sebagai residu

kolonial yang secara logis harus lenyap atau terserap sepenuhnya dalam bingkai kebangsaan yang baru. 2) Hilangnya Indo dari ingatan publik diterima sebagai norma pascakolonial atau *takdir sejarah*, bukan sebagai hasil kebijakan politik yang disengaja. Hegemoni ini melahirkan kepatuhan, yaitu sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya secara kritis. Kontrasnya dengan Etnis Tionghoa menguatkan tesis ini. Etnis Tionghoa, yang dipandang sebagai ancaman realistis (dominasi ekonomi) dan simbolis (keraguan loyalitas), memerlukan *dominasi koersif* yang terlihat jelas (*Political Society* yang aktif) melalui kebijakan diskriminatif (seperti Inpres No. 14 Tahun 1967). Sementara itu, terhadap Indo, yang ancaman demografisnya sudah dieliminasi oleh *Political Society* di awal kemerdekaan, *Civil Society* hanya perlu melakukan hegemoni pasif dengan cara omisi dan penormalan kelupaan.

Politik Memori Sebagai Seleksi Historis

Hilangnya identitas orang Indo dari narasi kebangsaan Indonesia bukan sekadar akibat demografis (emigrasi) atau fenomena kebudayaan pasif, melainkan produk interaksi sistemik antara struktur hukum-administratif, praktik institusional (terutama pendidikan dan media), serta kerja simbolik intelektual dan budaya yang memproduksi *consent* — penerimaan kolektif atas definisi sempit tentang "keindonesiaan". Dalam istilah Gramsci, kelas penguasa dan koalisi elite nasional membangun hegemoni kultural: bukan semata lewat paksaan, tetapi lewat normalisasi suatu narasi yang membuat pengecualian terhadap identitas hibrid tampak wajar atau tidak relevan. Politik ingatan menjelaskan bagaimana negara dan aktor kultural memilih apa yang akan diingat dan apa yang dilupakan: mekanisme seleksi ini meliputi buku teks, museum, monumen, kebijakan kewarganegaraan, dan praktik media—kesemuanya bekerja sebagai infrastruktur memori.

Politik Ingatan (*Politics of Memory* atau PoM) adalah proses disengaja di mana aktor-aktor yang berkuasa—biasanya negara dan aparat ideologisnya—memilih, membentuk, dan melembagakan narasi masa lalu tertentu, sembari secara simultan meminggirkan atau menghapus narasi tandingan. Dalam konteks Indonesia pascakolonial, PoM berfungsi sebagai mekanisme seleksi historis yang secara agresif menolak pluralitas pengalaman dan memaksakan tafsir tunggal demi legitimasi kekuasaan dan pemeliharaan hegemoni nasionalis. Proses seleksi ini secara fundamental menghilangkan identitas Orang Indo dari narasi Keindonesiaan. Fungsi utama PoM adalah menotalisasi masa lalu (*totalizing the past*). Setelah gejolak politik 1965, PoM di Indonesia didominasi secara ketat oleh militer dan negara. Rezim Orde Baru mendasarkan legitimasinya pada interpretasi sejarah yang tunggal dan tidak tertandingi, terutama terkait Peristiwa 1965. Militer mengeluarkan publikasi resmi (seperti *40 Hari Kegagalan "G-30-S"*) untuk menetapkan referensi tunggal bagi penulisan sejarah. Tindakan ini merupakan upaya totaliter untuk memaksakan satu tafsir tunggal terhadap masa lalu, yang secara langsung mengingkari pluralitas pengalaman dan ingatan kolektif bangsa. Dengan demikian, PoM berfungsi sebagai alat seleksi ideologis yang meniadakan legitimasi setiap narasi yang tidak sejalan dengan kepentingan negara. Penghapusan, dalam konteks ini, adalah hasil dari kebijakan otoriter negara untuk melegitimasi kekuasaannya melalui kontrol absolut atas diskursus masa lalu. Inilah cara PoM menyeleksi: hanya ingatan yang mendukung status quo politik dan ideologis yang diizinkan untuk diwakilkan dalam ranah publik.

PoM menjalankan fungsi seleksinya melalui proses ideologisasi dan mitologisasi masa lalu, terutama dalam ranah Masyarakat Sipil (pendidikan, historiografi). Studi menunjukkan adanya pertalian sistematis antara kreativitas penulisan sejarah (yang menyangkut ideologisasi dan mitologisasi) dan konflik identitas pascakolonial. PoM Orde Baru secara aktif menyeleksi jenis identitas yang boleh diwakili. Rezim melihat masalah identitas—baik etnis maupun nasional—sebagai konstruksi yang bersifat sudah jadi (*given*) dan harus dipaksakan, alih-alih dibiarkan berkembang secara alami. Kategori *Keindonesiaan* yang disukai (yang berhasil diseleksi oleh PoM) adalah identitas yang didasarkan pada prinsip *ethnocultural* (kesamaan etnis dan nenek moyang) dan *perennialist* (asal-usul yang sudah berlangsung lama). Untuk menguatkan kategori ini, kurikulum sejarah secara resmi difokuskan pada penelusuran asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang bersifat praaksara dan penguatan rasa cinta tanah air (Kurikulum 1968). Secara fungsional, ini adalah tindakan seleksi: PoM memilih representasi yang jauh dari masa kolonial akhir yang rumit (praaksara) dan menolak representasi yang

rumit secara rasial dan politik (Indo). Identitas Indo, yang secara inheren terkait dengan warisan kolonial dan ambiguitas rasial , secara otomatis tersingkir dari kerangka "keaslian" yang diseleksi oleh PoM.

Mekanisme seleksi representasi sejarah semakin kuat melalui kontrol negara terhadap sistem komunikasi massa. PoM menggunakan kontrol ini untuk menghasilkan "kisah-kisah yang disetujui pemerintah" yang secara efektif memengaruhi pemikiran masyarakat. Dengan memonopoli media dan pendidikan, PoM memastikan bahwa narasi-narasi tandingan—termasuk ingatan kolektif Indo—tidak pernah mencapai visibilitas dan menjadi bagian dari akal sehat publik. PoM bekerja dengan asumsi bahwa mengubah keyakinan yang dipegang masyarakat sejak lama jauh lebih sulit daripada sekadar menerapkan perubahan politik, sehingga kontrol atas narasi adalah prioritas tertinggi. Meskipun seleksi naratif Indo dilakukan melalui omisi ideologis, proses ini dilindungi dan dimungkinkan oleh kemampuan PoM untuk menggunakan koersi dan pembungkaman sosial, yang berada di antarmuka *Political Society* dan *Civil Society*. Dalam ranah hukum, PoM berfungsi untuk mengubah hakim menjadi 'arbiter sejarah'. Sebagai contoh, undang-undang Anti-Komunisme yang melarang penyebaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme tidak hanya menghukum tindakan, tetapi juga menguji pidato dan tulisan. Praktik ini menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman sosial (*social silencing*) yang jauh melampaui isu Komunisme itu sendiri. Dalam lingkungan politik yang represif ini, setiap narasi yang menantang klaim kebenaran tunggal negara atau yang dianggap 'tidak pantas' (seperti klaim identitas Indo yang ambigu) dikriminalisasi atau ditakuti, dan akhirnya bungkam secara struktural. Pembungkaman ini secara efektif menyeleksi keluar narasi Indo dari diskusi publik. Karena trauma kekerasan pasca-1965 menghasilkan memori yang dicirikan oleh penyangkalan, stigmatisasi, dan marginalisasi , tidak ada ruang bagi ingatan yang rumit dan non-puritan untuk bertahan.

PoM menyeleksi narasi Indo melalui strategi unik: penghapusan naratif (*narrative erasure*). Ini kontras dengan strategi yang diterapkan pada Etnis Tionghoa, yang mengalami diskriminasi aktif dan stigmatisasi berkelanjutan. PoM negara menyeleksi Orang Indo untuk kelupaan struktural karena dua alasan yang saling terkait: 1) PoM didukung oleh tindakan koersif awal *Political Society* (Undang-Undang Kewarganegaraan 1946 dan Opsi KMB 1949) yang secara hukum mendiskriminasi 'peranakan' dan menghasilkan eksodus massal. Setelah basis demografis yang kuat hilang, Orang Indo berhenti menjadi ancaman politik yang signifikan. 2) PoM kemudian hanya perlu melakukan omisi di ranah *Civil Society*. Narasi Indo dipilih untuk dikesampingkan karena memori mereka dianggap tidak lagi relevan dengan proyek pembangunan bangsa yang homogen. Dalam analisis sastra, misalnya, identitas Indo sering diposisikan sebagai "liyan" (*other*) yang mencerminkan kecemasan nasionalisme. Dengan demikian, PoM berfungsi menyeleksi: tidak perlu represi aktif terhadap narasi Indo, cukup dengan menghilangkannya dari representasi sejarah resmi. Keheningan struktural ini adalah bentuk hegemoni yang paling efisien, karena ia menciptakan konsensus bahwa narasi tersebut memang *seharusnya* tidak ada, sehingga tujuan seleksi historis pun tercapai secara paripurna.

Proses Reduksi Kehadiran Indo Dalam Narasi Identitas Nasional

Institusi yang paling berpengaruh dalam proses penghapusan naratif adalah: (1) sistem pendidikan (kurikulum dan buku teks), (2) perangkat hukum/administratif — khususnya kebijakan kewarganegaraan pasca-KMB, dan (3) ruang publik media (media massa nasional dan budaya populer). Masing-masing berfungsi dengan mekanisme berbeda namun saling memperkuat dalam membentuk hegemoni kultural. Penggunaan undang-undang anti-Komunisme lebih lanjut menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman sosial (*social silencing*), yang melampaui isu PKI. Proses ini mentransformasi hakim menjadi 'arbiter sejarah' dan mengkriminalisasi wacana tandingan, menciptakan lingkungan di mana setiap narasi yang tidak sesuai dengan narasi negara-bangsa yang puritan (termasuk klaim identitas minoritas yang ambigu seperti Indo) dianggap berpotensi mengancam stabilitas. Ini adalah manifestasi fungsi *Political Society* yang mendukung kontrol ideologis *Civil Society*.

Sekolah berfungsi sebagai mesin reproduksi ideologi yang sangat efektif, di mana negara menggunakan pedagogi formal dan kurikulum untuk mendefinisikan dan mentransmisikan versi resmi dari masa lalu. Melalui silabus dan buku teks sejarah, narasi nasionalisme disederhanakan secara fundamental menjadi plot "pribumi melawan penjajah". Proses penyederhanaan teleologis ini secara inheren menghilangkan ruang bagi aktor-aktor perantara dan komunitas Indo karena mereka tidak sesuai dengan dikotomi biner tersebut. Proses ini dapat dimaknai sebagai praktik Hegemoni Antonio Gramsci: kurikulum mengubah pluralitas pengalaman sejarah menjadi satu "common sense" historis yang tunggal dan diinternalisasi secara luas ((Gramsci, 2021); (Anderson, 1991)). Implikasi dari mekanisme ini adalah bahwa generasi demi generasi mempelajari sebuah sejarah yang menyisihkan eksistensi kelompok hibrida, memperkuat konsensus aktif bahwa makna "Keindonesiaan" bersifat tunggal dan puritan, sehingga berkontribusi pada kelupaan struktural identitas Orang Indo.

Kebijakan legal-administratif pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 berfungsi sebagai teknologi hegemoni yang efektif, memungkinkan negara baru untuk secara tidak langsung mengatur komposisi demografis dan menyingkirkan identitas Indo dari ranah publik. Instrumen hukum ini menyediakan mekanisme opsi kewarganegaraan bagi orang-orang keturunan kolonial untuk memilih antara menjadi warga negara Indonesia atau mempertahankan kewarganegaraan Belanda. Meskipun secara formal bersifat "pilihan", kondisi sosial-politik pasca-revolusi, ketidakpastian status hukum, dan stigma identitas membuat opsi ini berimplikasi koersif, mendorong banyak individu Indo untuk memilih emigrasi ke Belanda sebagai pilihan paling rasional. Periode opsi kewarganegaraan (1949–1951), didukung oleh peraturan selanjutnya (misalnya, UU Kewarganegaraan 1958), menghasilkan emigrasi massal. Efek struktur ini adalah ketika komunitas tersebut keluar, mereka berhenti menjadi aktor publik yang reproduktif, menyebabkan artefak material, institusi komunitas, dan representasi simbolik mereka memudar di Indonesia. Dengan mengubah komposisi sosial secara faktual, kebijakan administrasi ini memudahkan penghapusan naratif karena objek (komunitas Indo) secara demografis berkurang, dan negara tidak melakukan upaya sistematis untuk mempertahankan representasi mereka dalam narasi resmi, sehingga memfasilitasi kelupaan struktural.

Media mainstream (surat kabar, radio, dan sinema nasional) berfungsi ganda dalam menegakkan hegemoni: menyebarkan narasi resmi negara dan sekaligus membentuk opini publik yang menerima narasi tersebut sebagai "common sense". Inilah ruang di mana hegemoni ideologis direproduksi secara cepat dan luas, memperkuat konsensus tunggal tentang identitas kebangsaan. Representasi Orang Indo dalam media nasional seringkali minimal, stereotipikal, atau secara eksklusif ditempatkan dalam konteks "masa lalu" yang bersifat nostalgia atau eksotisasi, alih-alih pengakuan historis yang kompleks. Melalui mekanisme agendasi, media memilih untuk mengangkat isu yang sesuai narasi anti-kolonial homogen, sehingga kisah-kisah mengenai aktor perantara jarang mendapat sorotan, sementara ketika muncul, mereka di-frame tanpa memberikan konteks ambivalen. Kontrasnya, ruang representasi positif dan preservasi memori Indo sering ditemukan pada media komunitas diaspora di luar negeri (misalnya, majalah Tong Tong atau Moesson). Distribusi memori yang terpisah ini—di mana narasi domestik termonopoli sementara kontestasi memori dipindahkan ke arena diaspora—merupakan faktor penting dalam penghapusan naratif karena ia mempersempit kemungkinan koreksi historiografis melalui liputan media di ruang publik Indonesia.

Dalam kerangka Gramsci, intelektual organik bukanlah akademisi pasif, melainkan aktor-aktor yang secara aktif mengartikulasikan nilai dan norma untuk mendukung sebuah blok hegemonik. Di Indonesia pascakolonial, figur-figur ini mencakup beragam kategori: pemikir kebudayaan seperti Sutan Takdir Alisjahbana yang merumuskan "jiwa nasional"; intelektual pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara yang membentuk pedagogi sejarah; akademisi dan birokrat negara yang menerjemahkan ideologi ke dalam kebijakan di departemen pendidikan dan kebudayaan; serta elite media yang membentuk opini publik melalui surat kabar dan tulisan. Secara kolektif, mereka berfungsi sebagai arsitek wacana yang meneguhkan gagasan tentang kemurnian identitas nasional. Agenda utama para intelektual organik ini adalah membangun legitimasi moral-kultural bagi negara yang baru merdeka, dengan mengadvokasi sebuah identitas "otentik" untuk menciptakan kohesi nasional dan menolak warisan kolonial. Narasi pembersihan simbolik ini mendapat resonansi politik yang kuat dan

memfasilitasi kolaborasi normatif dengan negara. Ide-ide mereka diserap ke dalam kebijakan, seperti kurikulum dan pidato kenegaraan, sementara intelektual yang menduduki posisi birokratik dapat secara langsung memengaruhi peraturan budaya dan kebijakan kebangsaan. Terciptalah sebuah hubungan legitimasi ganda: negara memberikan legitimasi administratif, sementara para intelektual memberikan legitimasi moral. Meskipun niat mereka pada dasarnya anti-kolonial, hasilnya adalah penolakan terhadap hibriditas, karena ambiguitas yang melekat pada identitas campuran dianggap mengancam narasi pembebasan yang total dan murni.

Untuk mencapai tujuan ini, para intelektual organik menggunakan berbagai mekanisme retorika dan institusional. Secara retoris, mereka membangun dikotomi tajam antara "pribumi vs penjajah", menekankan "keaslian budaya", dan melakukan moralisasi terhadap "kepahlawanan pribumi". Secara kultural-institusional, mereka menyusun kurikulum sekolah, mendirikan badan-badan kebudayaan, dan mempublikasikan esai-esai populer. Mereka juga mendorong legislasi simbolik melalui kebijakan yang merayakan aspek-aspek tertentu dari identitas nasional (seperti monumen dan upacara), sambil secara sistematis mengabaikan yang lain. Implikasi analitisnya adalah bahwa perubahan narasi sejarah tidak cukup hanya dengan merevisi materi akademis; ia menuntut transformasi jaringan intelektual ini dan posisi mereka dalam aparatus negara, karena tanpa itu, setiap counter-narrative akan sulit menembus hegemoni yang telah mapan.

Proses penghapusan naratif terhadap identitas Orang Indo adalah hasil dari interaksi dinamis dan saling menguatkan di antara tiga ranah utama: struktur administratif-demografis, infrastruktur kultural-institusional, dan jaringan intelektual. Secara struktural, kebijakan opsi kewarganegaraan pasca-KMB memicu emigrasi massal, yang secara faktual mengurangi jumlah aktor dan keberadaan fisik komunitas Indo, menjadikannya "kurang relevan" secara demografis. Secara institusional, infrastruktur kultural seperti sekolah, kurikulum, dan media berperan dalam reproduksi narasi resmi yang homogen, secara sistematis mereduksi representasi Indo atau menempatkannya dalam framing yang stereotipikal. Terakhir, intelektual organik berfungsi memberi legitimasi moral dan pedagogis terhadap narasi homogen tersebut, menciptakan "common sense" normatif yang membenarkan pembersihan simbolik dari jejak hibriditas kolonial. Hegemoni ini terbentuk ketika ketiga ranah tersebut saling mengunci: kebijakan membuat orang pergi, infrastruktur kultural mereduksi representasi mereka, dan intelektual memberi alasan normatif mengapa reduksi itu dibenarkan. Dalam perspektif politik ingatan, hasilnya adalah pemusatan memori kolektif pada versi sejarah yang tidak memerlukan penjelasan tentang kehadiran kelompok hibrida. Dengan kata lain, erasure ini bersifat ganda—pasif (kelupaan struktural) dan aktif (seleksi narasi)—yang menghasilkan penghapusan epistemik, di mana ketiadaan di arsip, kurikulum, dan ruang publik membuat komunitas Indo "tidak ada" dalam tata ingatan kolektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hilangnya identitas orang Indo dari narasi keindonesiaan merupakan hasil dari proses hegemoni kultural yang bekerja melalui konsensus sosial, bukan semata represi politik. Dalam kerangka teori Antonio Gramsci, hegemoni dipahami sebagai kemampuan kelas dominan atau kelompok penguasa untuk menanamkan nilai, norma, dan pandangan dunia tertentu hingga diterima secara alami oleh masyarakat luas sebagai "kebenaran umum" (common sense). Dalam konteks pascakolonial Indonesia, proses ini beroperasi melalui seleksi memori dan rekonstruksi sejarah yang diarahkan untuk menciptakan identitas nasional yang homogen, murni, dan bebas dari ambiguitas kolonial. Negara, bersama intelektual organik yang menjadi agen ideologisnya, berhasil membangun hegemoni kultural melalui tiga institusi utama: pendidikan, media, dan kebijakan kewarganegaraan. Sistem pendidikan dan kurikulum sejarah nasional mereproduksi narasi tunggal tentang perjuangan "rakyat pribumi melawan penjajah", yang menyingkirkan kontribusi kelompok-kelompok perantara seperti orang Indo. Media massa memperkuat narasi ini dengan menormalisasi stereotip serta memosisikan identitas Indo sebagai simbol nostalgia kolonial yang tidak relevan dengan masa kini. Sementara itu, kebijakan kewarganegaraan pasca-Konferensi Meja Bundar (1949) menjadi

alat administratif yang mengatur dan memperkecil kehadiran komunitas Indo secara demografis dan politis, sehingga "ketiadaan" mereka di ranah publik tampak alamiah dan tidak dipersoalkan.

Dalam konteks teori Gramsci, ketiga instrumen ini bekerja sebagai aparatus hegemoni negara yang menanamkan ide tentang "kemurnian keindonesiaan" sebagai bentuk moralitas nasional baru. Proses ini menciptakan consent sosial di mana masyarakat menerima penghapusan identitas Indo sebagai bagian dari keniscayaan sejarah bangsa. Dengan demikian, penghapusan bukanlah tindakan represif tunggal, melainkan strategi kultural terencana yang membentuk kesadaran kolektif melalui pendidikan, media, dan regulasi. Hegemoni kultural ini kemudian menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai politik ingatan selektif—proses di mana negara menentukan apa yang layak diingat dan apa yang perlu dilupakan. Dalam hal ini, ingatan tentang komunitas Indo direduksi menjadi catatan pinggiran, atau sepenuhnya dihapus dari historiografi resmi. Arsip, buku teks, dan representasi budaya bekerja secara sinergis menciptakan arsitektur kelupaan yang mengkristalkan hegemoni dalam ranah memori publik. Dalam pandangan Gramsci, inilah wujud nyata dari kekuasaan kultural—kekuatan untuk mengatur pengetahuan dan memproduksi makna, bukan sekadar menguasai secara fisik atau ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya ruang resistensi dalam bentuk counter-memory yang tumbuh di kalangan diaspora Indo, peneliti, dan komunitas budaya. Melalui penerbitan, pameran, dan proyek digitalisasi arsip, mereka berusaha merebut kembali ruang narasi yang sebelumnya dimonopoli negara. Upaya ini menunjukkan bahwa setiap hegemoni senantiasa mengandung potensi kontra-hegemoni, yakni perlawanan terhadap tatanan makna dominan. Dengan demikian, politik ingatan bukan hanya arena pelupaan, tetapi juga ruang perjuangan simbolik antara memori dan kekuasaan.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan identitas Indo adalah cermin dari dinamika kekuasaan pascakolonial yang mengatur siapa yang berhak menjadi bagian dari bangsa. Dalam kerangka hegemoni Gramsci, penghapusan ini adalah strategi kultural yang berfungsi untuk menstabilkan konsensus nasional dengan cara meniadakan ambiguitas identitas. Namun, justru di dalam upaya pelupaan tersebut tersimpan tantangan epistemologis bagi studi sejarah dan kebudayaan Indonesia: perlunya membangun narasi kebangsaan yang lebih inklusif, yang mengakui keberagaman sebagai bagian sah dari proses menjadi Indonesia. Dengan merehabilitasi memori dan identitas Indo dalam ruang publik dan historiografi nasional, bangsa Indonesia dapat bergerak menuju bentuk hegemoni baru yang lebih reflektif—bukan hegemoni yang menyingkirkan, melainkan hegemoni yang mengintegrasikan perbedaan dalam kesadaran sejarah bersama.

REFERENSI

Anderson, B. R. O. (1991). Imagined communities : Reflections on the origin and spread of nationalism. In *Verso* (Revised).

Aryani, M. K. (2022). INPRES NO 14 TAHUN 1967: BENTUK DISKRIMINASI PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP ETNIS TIONGHOA. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, *2*(2), 01–12.

Assmann, J., & Czaplicka, J. (1995b). Collective Memory and Cultural Identity. *New German Critique*, *65*, 125.

Bosma, U., Kessler, G., & Lucassen, L. (2013). *Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective: An Introduction*. Koninklijke Brill NV.

Gramsci, A. (2021). *The Modern Prince & Other Writings* (Reprint of the Edit…). Foreign Languages Press.

Hewwet, R. (2017). *Mixed Race in Asia: Class, Race and being Indo (Eurasian) in Colonial and Postcolonial Indonesia* (Z. L. Rocha & F. Fozdar, Eds.). Routledge.

Hewwet, R. L. (2016). *INDO (EURASIAN) COMMUNITIES IN POSTCOLONIAL INDONESIA*. The Australian National University.

Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. *Annual Review of Sociology*, *24*(Volume 24, 1998), 105–140.

Reid. Anthony. (2010). *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia - Anthony Reid* . Cambridge University Press.